

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hakekat pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia; tanpa membedakan suku bangsa, agama dan jenis kelamin. Hal tersebut berarti bahwa melalui pembangunan di upayakan dapat mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Dunia kerja yang selama ini selalu dianggap milik laki-laki sebagai dunia publik mulai mendapat “penghuni” baru yang namanya perempuan yang selama ini selalu diasumsikan “menghuni” dunia domestik.

Pendapatan yang tidak mencukupi yang dihasilkan oleh kepala keluarga (suami), mendorong para perempuan untuk berperan aktif dalam membantu pendapatan ekonomi keluarga. Persoalan yang dihadapi perempuan dari golongan berpenghasilan rendah pada khususnya, timbul karena ada kaitanya dengan status sebagai perempuan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan melalui proses pembangunan sosial ekonomi. Menjadi perempuan yang memiliki banyak peran tidaklah semudah yang dibayangkan. Diperlukan keterampilan tambahan atau ilmu pengetahuan yang dapat menunjang peran yang dilakukan perempuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi modal dasar pembangunan, dan tentu harus disertai dengan peran serta fungsinya yang akan menentukan keberhasilan dari pembangunan tersebut, potensi perempuan merupakan aset besar yang harus dapat

dikembangkan untuk pembangunan, oleh karena itu penduduk perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya.

Pembangunan harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup, baik laki-laki maupun perempuan agar berperan dalam pembangunan. Pembangunan yang berperspektif gender berdasarkan pada prinsip utama kesamaan memperoleh akses, peran, kontrol dan manfaat serta kesempatan berpartisipasi dalam program pembangunan harus menjadi perhatian bersama. Perempuan saat ini memiliki peran yang cukup beragam, mulai pendidik sampai karir. Tidak dapat dipungkiri, saat ini perempuan banyak yang berperan sebagai laki-laki yang memberikan nafkah keluarga. Prasetyo (2015:226-238)

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Manifestasi ketidakadilan gender telah mengakar mulai dari keyakinan di masing-masing orang, keluarga, hingga pada tingkat negara yang bersifat global. Ketidakadilan gender menimbulkan aliran feminisme, yang secara umum menginginkan kesetaraan vcgender antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek kehidupan. Nugroho (2011: 16-30).

Apabila perempuan ingin bekerja dalam kaitannya membantu suami, maka ia harus memiliki kemampuan bekerja pada bidang pekerjaan yang ia kerjakan. Perempuan yang mengurus anak akan berbeda perannya ketika ia juga harus bekerja di luar rumah. Perempuan melakukan peran ganda akan memiliki perbedaan pembagian waktu melakukan perannya dibandingkan dengan perempuan yang melakukan peran tunggal. Mereka akan berusaha membagi

waktu yang tepat mengerjakan pekerjaan di sektor domestik dan sektor publik. Perempuan yang bekerja tidak hanya untuk mengisi waktu luang, namun juga mereka ingin meningkatkan taraf kehidupannya sendiri maupun keluarganya.

Perempuan di pedesaan bekerja bukan semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, tetapi untuk mencari nafkah karena pendapatan suaminya dikatakan kurang mencukupi kebutuhan sehingga banyak perempuan atau ibu rumah tangga yang bekerja. Apabila pendapatan suami kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka tidak dapat dipungkiri adanya peran lain yang harus dilakukan oleh perempuan selain melakukan pekerjaan domestik. Aswiyati dalam (Rudi, 2012:64-73)

Persentase penduduk Indonesia dengan jenis kelamin perempuan dari tahun ke tahun hampir menunjukkan setengah dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada tahun 2013 saja, persentase jumlah laki-laki sebesar 50,25% dan persentase jumlah penduduk perempuan sebesar 49,75%). Dengan kata lain, perempuan juga memperoleh hak yang sama dengan laki-laki untuk menyumbangkan perannya dalam memajukan pembangunan bangsa dan ekonomi. Seperti laki-laki, perempuan juga dapat menggunakan haknya di berbagai bidang kehidupan. Hal ini sudah ada di dalam UUD 1945 pasal 27, pasal 28, pasal 28A-J, pasal 30 ayat (1), pasal 31, pasal 32 ayat (1), pasal 33, dan pasal 34 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, upaya bela negara, untuk hidup, mendapat pendidikan, memajukan diri, mendapat jaminan hukum, kebebasan memilih kepercayaan, berserikat, dan lain sebagainya.

Pada kenyataannya masih banyak perempuan, terutama ibu rumah tangga yang tidak memiliki akses untuk memiliki peran lebih di kalangan masyarakat. Akses yang ada di era modernitas ini diperuntukkan bagi manusia yang dapat mengelola peluang usaha dengan baik yang memadukan unsur modernitas sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi modern pun tidak dapat dihindari untuk menunjang usaha yang dikelola. Oleh sebab itu, perempuan menjadi terhambat untuk melakukan peran yang lebih seperti bekerja dan memulai usaha.

Era yang serba modern ini, membuat perempuan atau ibu rumah tangga masih terbenani dengan pekerjaan domestik yang seolah-olah dibebankan kepadanya saja. Sebelum memulai pekerjaan pada sektor publik perempuan harus mengerjakan pekerjaan domestik terlebih dahulu, seperti mencuci, menyapu, memasak, dan mengurus anggota keluarga. Selain itu, beberapa perempuan hanya bekerja pada sektor tertentu yang kebanyakan adalah pedagang kecil, buruh pabrik dengan upah rendah, serta petani sayur mayur.

Rendahnya pendidikan formal yang mereka dapatkan saat masih muda, Tidak lulus SD (Sekolah Dasar) menjadikan mereka tidak dapat menulis dan membaca. Fenomena semacam ini merupakan faktor nyata yang ada di pedesaan yang membuat perempuan atau ibu rumah tangga terhambat aksesnya untuk maju. Frida (2017:4-5).

Jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia adalah setengah dari tenaga kerja laki-laki. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah ekonomi dan pendidikan. Dimana dinas pemberdayaan perempuan, Medan Johor memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai

persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Pada saat ini Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Tahun 2015 jenjang SD angka partisipasi murni penduduk perempuan sebesar 96,86 dan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 96,55. Jenjang SMP tahun 2015, APM dengan jenis kelamin perempuan sebesar 79,54. Sedangkan laki-laki mencapai angka 76,16. APM untuk jenjang SMA pada tahun 2015 semakin menunjukkan penurunan dibanding jenjang di bawahnya yaitu penduduk usia sekolah perempuan mencapai angka 60,77 dan penduduk laki-laki sebesar 58,74 .

Angka-angka tersebut menjelaskan bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan memiliki ketepatan waktu untuk bersekolah. Hasil survey membuktikan bahwa hampir setiap tahun angka yang ditunjukkan oleh ketepatan bersekolah perempuan lebih tinggi daripada APM laki-laki untuk setiap jenjang pendidikan formal.

Dinas pemberdayaan perempuan juga membentuk kelompok usaha bersama sebagai usaha mandiri melalui program Pemberdayaan Perempuan, Program ini merupakan Program Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan pada aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Salah satu kelompok usaha mandiri tersebut adalah keterampilan menjahit untuk perempuan khususnya ibu rumah tangga Kel. Sunggal. Yang memiliki dasar hukum selain undang-undang yakni surat keputusan: Pertama, Undang-undang no 25 tahun 2000 “ laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama

dalam mengelolah pembangunan”. Kedua, Surat Keputusan Wali Kota Medan No 414/458.k/2016 tanggal 6 april 2016 tentang penetapan kelurahan percontohan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera kota medan 2016-2020. Ketiga, Surat Wali Kota Medan nomor 414.4/063/1/2019 tanggal 24 januari 2019 tentang penetapan kelurahan percontohan program terpadu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera untuk mengikuti perlombaan tahnu 2019. (SK Wali Kota Medan).

Perempuan-perempuan yang mengikuti kegiatan keterampilan merupakan warga yang tinggal di Kelurahan Sunggal melalui Program Pemberdayaan Perempuan dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Medan Johor akan diberikan pembinaan melalui penyuluhan dan pelatihan melalui P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) dan PKK (Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga) sebagai penggeraknya, berbagai keterampilan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan potensi diri warga binaan. Namun kegiatan tersebut memiliki kendala-kendala baik dari lapangan ataupun dari warga binaannya.

Hal ini dapat diketahui dari data hasil wawancara dengan Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dengan ibu berinisial I :

Pertama,Lahan/ tempat lokasi yang kurang menyebabkan warga binaan malas untuk mengikuti kegiatan keterampilan yang diadakan oleh pengelola melalui program Pemberdayaan Perempuan.Kedua, Pendidikan yang rendah berdampak pada pengetahuan yang kurang membuat warga binaan sulit memahami penjelasan dasar-dasar dari kegiatan keterampilan yang dilaksanakan oleh pengelola melalui Program Pemberdayaan Perempuan sebelum di

laksanakan kegiatan keterampilan. Ketiga, Kurang partisipasi warga binaan yang lebih memilih untuk dirumah dari pada mengikuti keterampilan karena mereka berpendapat bahwa kegiatan keterampilan yang dilaksanakan oleh pengelola melalui program Pemberdayaan perempuan hanya membuang –buang waktu mereka dan hasilnya sangat lama.

Dan Tidak semua warga binaan mengetahui bakat yang mereka miliki sehingga Warga binaan masih banyak terjebak dalam mengambil kegiatan keterampilan. Banyak diantara mereka setelah masuk didalam kegiatan keterampilan tersebut tidak memahami bidang yang mereka ambil. Artinya mereka masih banyak yang tidak mengetahui bakat apa yang mereka miliki dan kegiatan keterampilan apa yang cocok untuk mereka.

Dimana Kegiatan pelatihan tersebut pada dasarnya dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan perilaku dan meningkatkan ekonomi keluarga orang-orang yang mengikuti pelatihan. Perubahan perilaku yang dimaksud disini adalah dapat berupa bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, perubahan sikap dan juga dapat meningkatkan penghasilan setiap warga yang mengikuti pelatihan sehingga dapat membantu perekonomian, pendidikan dan kesehatan, sebagai penunjang terciptanya lapangan pekerjaan sebagai bekal untuk mandiri.

Selain itu warga binaan, yang diikuti oleh ibu-ibu/perempuan di kelurahan tunggal diharapkan memiliki sikap kemandirian yang tumbuh setelah pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh pengelola Pemberdayaan Perempuan. Warga binaan memiliki motivasi yang tinggi, dibuktikan dengan usaha menjahit yang sudah dimiliki warga binaan. Sikap memiliki rasa tanggungjawab ditunjukkan peserta didik dengan dibuktikan adanya semangat baru dari dalam diri warga

binaan untuk berusaha mandiri. Sikap tidak bergantung pada orang lain ditunjukkan peserta didik melalui sikap mandiri melalui kegiatan yang di adakan oleh pengelola Pemberdayaan Perempuan.

Warga binaan juga diharapkan mampu mengaplikasikan kegiatan keterampilan yang mereka peroleh saat mengikuti pelatihan. Sikap disiplin peserta didik ditunjukkan dengan ketepatan waktu dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh peserta didik. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian terhadap perempuan yang berada di Kelurahan Sunggal dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Medan Johor bersama masyarakat setempat dengan mengambil judul penelitian “Upaya Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Bakat Perempuan di Kelurahan Sunggal”.

1.2 Fokus Masalah

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka peneliti hanya memfokuskan pada Upaya Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Bakat Perempuan Di Kelurahan Sunggal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang ada yaitu :

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Bakat Perempuan Di Sunggal sudah dapat membantu perekonomian di lingkungan tersebut?

- b. Apa yang menjadi faktor pendorong Upaya Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Bakat Perempuan Di Kelurahan Sunggal.
- c. Apa yang menjadi faktor penghambat Upaya Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Bakat Perempuan Di Sunggal?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

- a. Mengetahui Upaya Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Bakat Perempuan Di Kelurahan Sunggal.
- b. Mengetahui faktor pendorong Upaya Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Bakat Perempuan Di Kelurahan Sunggal.
- c. Mengetahui faktor penghambat Upaya Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Bakat Perempuan Di Kelurahan Sunggal.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

- a. Pengembangan keilmuan pendidikan, khususnya pendidikan masyarakat maupun bagi para peneliti.
- b. Memperkaya kajian penelitian di bidang pendidikan masyarakat.

- c. Memperkaya kajian tentang upaya Pengelola Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Bakat Perempuan di Kelurahan Sunggal. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi inspirasi atau bahan kajian bagi penelitian berikutnya.
- d. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang upaya Pengelola melalui Program Pemberdayaan Perempuan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan keterampilan yang dilaksanakan Program Pemberdayaan Perempuan dan memakmurkan anggotanya
- b. Sebagai bahan pemikiran bagi instansi terkait seperti Depag, Dinsos, juga dinas lainnya dalam mengembangkan potensi daerah lain.
- c. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian bagi yang berminat dalam masalah pemberdayaan perempuan
- d. Sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan penelitian sejenis dengan penelitian ini bagi para peneliti atau lembaga penelitian.